

TESIS
PERSIAPAN PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN DALAM
MENGHADAPI PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Magister Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik*

Oleh :

AHMAD NUR ANSARI

E052202002

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PERSIAPA PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN DALAM
MENGHADAPI PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024**

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD NUR ANSARI

E052202002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **26 Juni 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

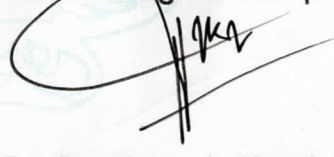
Menyetujui

Pembimbing Utama,



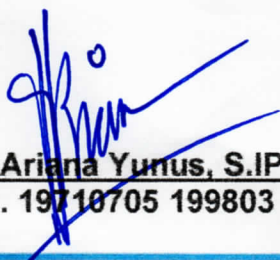
Prof. Dr. Muhammad, M.Si.
NIP. 19710917 199703 1001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si
NIP. 19730813 199802 2001

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.
NIP. 19710705 199803 2002.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
NIP. 196511091991031008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD NUR ANSARI
NIM : E052202002
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Jenjang : Strata 2 (S2)

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **Persiapan Partai Golkar Sulawesi Selatan Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif Tahun 2024.**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Tesis karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 26 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



AHMAD NUR ANSARI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis hingga saat ini diberikan kesehatan serta dapat menyelesaikan karya ilmiah tesis ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta, yaitu Ibu **Hj. Andi Intang** dan Ayah penulis **H. Abdul Wahab, S.Pd** yang selalu memberikan dukungan serta iringan doa siang dan malam yang tiada hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, sehingga menjadi alasan utama tesis ini bisa dan harus diselesaikan. Kepada keluarga tercinta **Ahmad Febriansyah dan Rifdah Mufiidah Rusli, S.KM., M.Kes** yang tidak pernah putus memberikan keceriaan, doa, serta dukungan baik secara moril maupun material, beserta seluruh keluarga besar yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih semua atas dorongan, motivasi, perhatian, dukungan, dan doa di saat susah dan senang kepada penulis selama ini.

Terima kasih tak terlupa dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua pembimbing penulis yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, yakni **Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si** selaku pembimbing utama, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini. **Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si** selaku penasehat pembimbing pendamping, yang telah banyak

membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan tesis ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. **Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Megister Ilmu Politik FISIP Unhas.
4. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin baik selama penulis mengikuti perkuliahan di S1 maupun S2 ini, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Umami Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Zulhajar, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP, M.Si** Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan

sebaik mungkin.

5. Seluruh Staf khususnya Departemen Ilmu Politik, serta staf administrasi Pascasarjana di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagipenulis selama ini.
6. Terima kasih kepada para informan semua informan yang terlibat pada penelitian ini khususnya Ibu Andi Ina Kartikasari, selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Bendahara Umum DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Bapak La Kama Wiyaka, Ketua Bappilu DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Bapak Rahman Pina, selaku Ketua AMPG Sulawesi Selatan sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Fahrudin Rangga, selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar Sulsel sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bapak Abbas Hady, selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan untuk menunjang Tesis ini, memberikan banyak bantuan dan kemudahan kepada penulis.
7. **Keluarga Besar Magister Ilmu Politik Angkatan 2020**, Ray Suryadi, Nurlira Goncing, Muh. Syafi'l Syahrir, Rury Ramadhan, Amalia, Muhammad Gaus, Galank Pratama, Muh. Fichriyadi Hastira, Andi Ulfatul Zahra, Kurnia Sulistiani, terimakasih atas dukungan dan dorongannya selama perkuliahan. Tanpa kalian, penulis tidak akan

bisa seperti ini. Terima kasih.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 23 Juni 2023

AHMAD NUR ANSARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kerangka Teori.....	10
2.1.1 Pendekatan Institusionalisme	10
2.1.2 Institusionalisme Partai	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Skema Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	35
3.2 Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian	35
3.3 Jenis Data Penelitian.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	41
4.1 Gambaran Umum Partai Golkar	41
4.2 Gambaran Umum DPD I Partai Golkar Sulsel	49

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	50
5.1 Dimensi Systemnes Partai Golkar Sulsel.....	50
5.2 Dimensi Reification Partai Golkar Sulsel.....	63
5.3 Implikasi Teoritik.....	74
BAB VI PENUTUP	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

ABSTRAK

Ahmad Nur Ansari. NIM E052202002. Persiapan Partai Golkar Sulawesi Selatan Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Di bawah bimbingan Bapak Muhammad dan Ibu Gustiana A. Kambo.

Partai politik sangat menentukan keberlangsungan sistem demokrasi di sebuah negara, tanpa adanya partai politik demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Seluruh partai politik memerlukan institusionalisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dari partai tersebut dalam menghadapi pemilu, sebab partai politik dituntut untuk senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas organisasinya melalui pembenahan secara internal maupun eksternal. Dengan kondisi ini, sistem pelembagaan partai politik yang mapan menjadi penting dalam upaya untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu. DPD I Partai Golkar Sulsel merupakan partai pemenang pemilu di Sulsel, hal ini tentu saja tidak terlepas dari institusionalisasi partai yang mapan setiap kali menghadapi pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulsel dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini melibatkan para fungsionaris DPD I Partai Golkar Sulsel sebagai sumber informasi untuk menarik kesimpulan secara komprehensif. Selain itu, berbagai cara pengumpulan data yang dilakukan diantaranya adalah wawancara mendalam dan dokumentasi dengan telaah mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun pendekatan dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan institusionalisme, dan konsep institusionalisasi partai.

Hasil penelitian ditemukan upaya persiapan DPD I Partai Golkar Sulsel dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024 dari segi institusionalisasi partai yang dapat dilihat melalui dua dimensi. Pertama dimensi kesisteman, DPD I Partai Golkar Sulsel memperkuat kaderisasi dan menggunakan sehubungan kader untuk membantu kemenangan Pemilu tahun 2024 mendatang melalui pembentukan kelembagaan partai secara struktural. Untuk menghindari konflik internal DPD I Partai Golkar Sulsel lebih mengedepankan proses musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kedua dimensi Reifikasi, untuk mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat, DPD I Partai Golkar Sulsel memperkuat citra politiknya dengan melaksanakan kegiatan sosial dan kemanusiaan serta rekrutmen dan pendidikan politik di masyarakat dengan program Yellow Clinic, Golkar Milenial dan Golkar Institute.

Kata Kunci : Partai Golkar, Institusionalisasi Partai, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

Ahmad Nur Ansari. NIM E052202002. Preparation of the South Sulawesi Golkar Party in Facing the 2024 Legislative Elections. Under the guidance of Mr. Muhammad and Mrs. Gustiana A. Kambo.

Political parties greatly determine the sustainability of the democratic system in a country, without political parties democracy will not run well. All political parties need institutionalization to improve the party's organizational performance in facing elections, because political parties are required to always maintain and maintain organizational stability through internal and external improvements. Under these conditions, an established institutional system of political parties is important in efforts to win the competition in elections. DPD I Golkar Party in South Sulawesi is the winning party in the election in South Sulawesi, this is of course inseparable from the established institutionalization of the party every time it faces an election.

This study aims to find out how the institutionalization of the DPD I Golkar Party in South Sulawesi faces the 2024 legislative elections. The author uses a qualitative descriptive research method. This research involved DPD I functionaries of the South Sulawesi Golkar Party as a source of information to draw comprehensive conclusions. In addition, various methods of data collection were carried out including in-depth interviews and documentation with an in-depth study of matters relating to this research problem. The approaches and concepts used in this study are the institutionalism approach, and the concept of party institutionalization.

The results of the study found that efforts to prepare DPD I for the Golkar Party in South Sulawesi in facing the 2024 legislative elections in terms of party institutionalization can be seen through two dimensions. First, the systemic dimension, the DPD I Golkar Party of South Sulawesi strengthens cadres and uses all cadres to help win the upcoming 2024 elections through the structural formation of party institutions. To avoid internal conflicts, DPD I Golkar Party of South Sulawesi prioritizes the deliberation process in decision making. The two dimensions of Reification, to gain support and sympathy from the people, DPD I Golkar Party of South Sulawesi strengthened its political image by carrying out social and humanitarian activities as well as recruitment and political education in the community with the Yellow Clinic, Millennial Golkar and Golkar Institute programs.

Keywords: Golkar Party, Party Institutionalization, General Election.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik sangat menentukan keberlangsungan sistem demokrasi di sebuah negara, tanpa adanya partai politik demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Ini dikarenakan partai politik merupakan suprastruktur yang harus dimiliki sebuah sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratis.¹

Partai politik sebagai bagian dari suprastruktur politik berperan menyeimbangkan serta mengontrol kinerja pemerintah agar terjadi keseimbangan dalam jalannya sistem politik. Partai politik itu sendiri merupakan organisasi yang bersifat dinamis, partai politik mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui proses yang panjang. Huntington mengungkapkan bahwa partai politik itu tumbuh dan berkembang melalui setidaknya empat tahapan penting, yakni faksionalisme, polarisasi, ekspansi, dan institusionalisasi.² Berdasarkan keempat tahapan perkembangan ini ia memosisikan pelembagaan sebagai tingkatan tertinggi dalam fase pertumbuhan dan perkembangan partai politik. Hal inilah yang menjadikan pentingnya tingkat pelembagaan

¹ Muhammad Ridha T.R, Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan, *Cosmogov Vol.2 No.1*, April 2016.

² Huntington dalam Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2011

bagi sebuah partai politik di negara demokrasi seperti Indonesia.

Indonesia sampai saat ini masih berada dalam tahap transisi menuju konsolidasi demokrasi. Proses transisi ini nampaknya akan berjalan lebih lama dari perkiraan sebelumnya, karena lemahnya komponen-komponen yang bisa menjamin terselenggaranya sistem yang demokratis. Salah satu komponen tersebut adalah partai politik. Kurang berfungsinya serta proses institusionalisasi partai politik yang belum maksimal di Indonesia merupakan permasalahan umum dalam era transisi demokrasi. Permasalahan ini masih harus ditambah dengan permasalahan konsolidasi internal partai, sehingga demokrasi yang diharapkan akan semakin sulit dicapai. Permasalahan konsolidasi internal partai banyak terlihat dari timbulnya konflik-konflik internal yang berimplikasi langsung terhadap kekuatan partai politik secara institusi.³

Partai politik yang tidak mampu mengimplementasikan segala peran dan fungsinya dalam realitas politik menjadi hal yang memperpanjang catatan buruk bagi partai politik itu sendiri. Institusionalisasi partai tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena terdapat kelemahan-kelemahan internal dan eksternal partai. Kemampuan eksternal dari partai politik yang belum berjalan fungsional secara baik, ditambah konflik internal organisasi yang semakin mengemuka sehingga menenggelamkan peran partai politik secara institusi. Salah satu masalah

³ Gustiana Kambo, Dimensi Proses Pelembagaan Partai Politik (Studi tentang Kelembagaan Partai Golkar di Provinsi Sulawesi Selatan), Makassar: Journal of Society and Governance, 2017

serius yang dihadapi partai-partai di Indonesia saat ini adalah tidak adanya institusionalisasi dalam tubuh partai secara menyeluruh. Partai seakan-akan hanya menjalankan aktivitasnya menjelang pemilu. Setelah itu, masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan partai politik.

Partai politik dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Karenanya, derajat kualitas demokrasi, salah satunya ditentukan oleh derajat kualitas partai politik di dalamnya. Kualitas partai politik berelasi kuat dengan proses pelebagaan. Dalam konteks itu, upaya untuk meninjau proses pelebagaan partai politik adalah bagian dari upaya memastikan demokrasi diisi oleh partai politik yang berkualitas.⁴ Fakta melemahnya pelebagaan partai politik secara khusus, dan sistem kepartaian secara umum, dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya daya survivalitas banyak partai politik. Sebagaimana yang dikatakan Huntington, dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai politik yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas partai dalam sistem kepartaian yang berlangsung.⁵

Realitas politik pada era reformasi menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan (kredibilitas) masyarakat terhadap partai politik secara massif. Hal ini dikarenakan partai politik tidak mampu memainkan fungsinya secara optimal. Partai-partai politik tidak memiliki kemampuan

⁴ Randall, Vicky dan Lars, Svasand. (2002). *Party Institutionalisation in New Democracies*. Party Politics. London: SAGE Publication

⁵ Huntington, S. (1968). *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press

mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun menghubungkan warga negara dengan pemerintah. Sehingga bukannya menjadi institusi yang mengantar masyarakat kepada kehidupan yang lebih demokratis, partai politik malah berubah menjadi sebuah institusi yang hanya mengejar kepentingan sendiri dan melupakan hakikat keberadaannya dalam sistem politik. Proses institusionalisasi yang kurang baik, manajemen internal yang rendah dan kurang dikelola secara demokratis mengakibatkan partai politik belum dapat menjadi institusi publik yang mampu menggerakkan kader secara massif untuk menerima kedaulatan institusi organisasi. Tentunya praktik ini hampir menjangkiti sebagian besar partai di Indonesia baik di tingkatan pusat maupun daerah.⁶

Secara umum pelembagaan partai politik merujuk pada sejauh mana sebuah partai mampu mencapai kematangan secara internal dan eksternal sebagai sebuah organisasi demokratis. Sehingga sebuah partai politik mampu bertahan ditengah persaingan politik kontemporer haruslah memiliki tingkat pelembagaan yang baik. Tingginya tingkat persaingan antar partai bukanlah satu-satunya rintangan yang dihadapi partai politik pasca Reformasi, terdapat masalah lain yakni menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Banyaknya tantangan yang dihadapi menuntut partai politik harus mampu bertahan dengan menerapkan berbagai strategi agar tetap memperoleh tempat dihati

⁶ Lili Romli pada Seminar dan Lokakarya "Penguatan Kelembagaan Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi", UGM Yogyakarta, 2012.

masyarakat konstituen mereka, salah satunya yakni dengan meningkatkan pelebagaan partai. Bagi partai politik yang mampu beradaptasi maka akan terus tumbuh dan berkembang, sebaliknya partai yang tidak mampu mengimbangi persaingan politik yang ada pada akhirnya akan hilang terseleksi persaingan yang semakin ketat.⁷

Partai politik memerlukan institusionalisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dari partai tersebut. hal ini mampu menunjang kehadiran proses yang lebih demokratis di dalam aktivitasnya. Pembinaan pada partai politik menjadi aspek yang mutlak dilakukan pada era demokratisasi. Selain karena partai politik memiliki peranan yang sangat vital sebagai penggerak arus demokrasi, juga derajat fungsinya sangat mempengaruhi aktivitas tatanan kelembagaan dalam sebuah negara.⁸

Partai Golkar sebagai salah satu partai peserta pemilu tahun 2024 harus memperhatikan institusionalisasi partainya dalam menghadapi pemilu khususnya pemilihan legislatif, sebab partai politik dituntut untuk senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas organisasinya, melalui pembenahan secara internal maupun eksternal. Dengan kondisi ini, sistem pelebagaan partai politik yang mapan menjadi penting dalam upaya untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu, ketika partai politik

⁷ Nurlatipah Nasir, Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelebagaan Partai Politik DI Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen, *Jurnal Politik Proferik Vol. 04 No. 1* Tahun 2016, hlm. 3.

⁸ Andi Rahmat Hidayat "Institusionalisasi Partai politik (Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang Tahun 2013), UNHAS Makassar. 2013.

telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik. Institusionalisasi Partai Golkar tidak hanya dilakukan di tingkat pusat seperti di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) saja tetapi harus dilakukan secara menyeluruh ke tingkat daerah seperti Dewan Pimpinan Daerah (DPD), salah satunya DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Partai Golkar melalui rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang dilaksanakan di Makassar menekankan pentingnya pelembagaan atau institusionalisasi partai dalam dimensi kesisteman hal itu disampaikan langsung oleh ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam sambutannya bahwa langkah persiapan yang utama dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang adalah konsolidasi internal Partai Golkar untuk memperkuat pelembagaan atau institusionalisasi partai. Hal ini sejalan dengan perkataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung bahwa strategi Partai Golkar Memenangkan Pemilu 2024 yaitu dengan mengurangi konflik internal partai. Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid juga mendorong adanya konsolidasi secara menyeluruh di tubuh DPD I Partai Golkar Sulsel, terlebih pemilu 2024 sudah di depan mata, dimana partai politik lain sudah bergerak dan bermanuver untuk merebut posisi Partai Golkar melihat ketatnya peta persaingan politik di Sulawesi Selatan.

Partai Golkar Sulawesi Selatan dibawah komando Taufan Pawe

telah menyelesaikan konsolidasi 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, sejauh ini 24 Kabupaten/Kota sudah menggelar musyawarah daerah memilih ketua baru definitif, 7 diantaranya dipimpin oleh kepala daerah kader Golkar. Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe menargetkan Partai Golkar kembali menjadi pemenang pemilu di Sulawesi Selatan. Sebagaimana diketahui bahwa Partai Golkar merupakan partai pemenang pemilu di Sulawesi Selatan selama beberapa periode belakangan ini.

Dalam dimensi pengetahuan publik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengintruksikan seluruh kader Golkar untuk terus bergerak dan turun langsung dalam penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional agar lebih dekat dengan masyarakat.

Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan merespon intruksi dari ketua umum dengan meluncurkan *Yellow Clinic* yang diresmikan bersamaan dengan pelantikan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe di acara ulang tahun Golkar yang ke-57, Taufan Pawe mengatakan *Yellow Clinic* ini bukan sekedar klinik biasa, klinik ini bersifat pratama yang artinya mulai dokter dan perawatnya itu jelas dan bisa bekerja sama dengan BPJS, sehingga klinik ini memang serius melayani masyarakat. Selain *Yellow Clinic* DPD I Partai Golkar

Sulsel telah menggelar sejumlah kegiatan kemanusiaan seperti bantuan UMKM, bantuan bencana alam, bantuan Pendidikan dan Kesehatan, serta vaksinasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif Di Tahun 2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi kesisteman dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024?
2. Bagaimana Institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi pengetahuan publik dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi kesisteman dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi pengetahuan publik dalam menghadapi pemilihan legislatif pada 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Menjawab fenomena sosial politik yang ada.
 - b. Menunjukkan secara ilmiah bagaimana institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi kesisteman, dan pengetahuan publik dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024.
 - c. Sebagai tambahan literatur dan bahan kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan khususnya dalam lingkup mahasiswa program studi ilmu politik.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi gelar megister ilmu politik.
 - b. Sebagai sarana pengembangan khasanah keilmuan bagi penulis secara pribadi.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan bagi siapa saja yang tertarik untuk meneliti topik penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

- d. Membantu para pelaku politik pada khususnya maupun masyarakat awam pada umumnya untuk memahami institusionalisasi partai politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis menguraikan beberapa konsep yang mendasari penelitian ini sehingga menjadi landasan penulis dalam memahami tema penelitian tentang persiapan Partai Golkar menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024, adapun beberapa konsep yang digunakan adalah pendekatan institusionalisme dan institusionalisasi partai politik.

2.1. Pendekatan Institusionalisme

Pendekatan institusional atau sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional.

Menurut Miriam Budiardjo⁹ seandainya kita ingin mempelajari parlemen dengan pendekatan ini maka yang akan dibahas adalah kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya seperti tertuang dalam naskah-naskah resmi (undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan tata tertib); hubungan formal dengan badan eksekutif; struktur organisasi (pembagian dalam komisi, jenjang-jenjang pembicaraan) atau hasil kerjanya (berapa undang-undang telah dihasilkan).

Para peneliti tradisional tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbentuk dan berfungsi seperti yang dirumuskan dalam naskah-naskah resmi tersebut, apalagi bertanya mengapa ada diskrepansi antara struktur formal dan gejala-gejala yang dapat diamati dalam praktik. Pada saat bersamaan, pendekatan tradisional tidak menghiraukan organisasi-organisasi informal, seperti kelompok kepentingan dan kelompok lainnya, dan juga media komunikasi. Bahasan ini lebih bersifat statis dan deskriptif daripada analitis, dan banyak memakai ulasan sejarah. Lagi pula dalam proses pembahasan, "fakta" (sesuatu yang dapat dibuktikan melalui pengalaman atau pengamatan) kurang dibedakan dengan norma (ideal atau standar yang harus menjadi pedoman untuk perilaku). Yang terjadi, pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif (yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu) dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi Barat. Menurut penglihatan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 72

Pendekatan Institusional memandang partai politik sebagai lembaga yang memiliki struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan. Teori kelembagaan (Institusional), yang menyatakan bahwa partai politik dibentuk oleh lembaga- lembaga negara baik legislatif maupun eksekutif sebagai kebutuhan para anggotanya untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak bias dengan kebutuhan, tuntutan, dan harapan publiknya. Sehingga dibuatlah wadah yang mampu menampung aspirasi warga masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah partai politik.

Partai politik adalah organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Secara sederhana partai politik merupakan representation of ideas yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada representation of ideas secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi.

2.2. Institusionalisasi Partai Politik

Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti

warga negara, *politike te ckne* berarti kemahiran politik dan *politike episteme* yang berarti ilmu politik.¹⁰

Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik sebagai “sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil kepada anggotanya”. Sedangkan menurut *Giovanni Sartori*, partai politik adalah “suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan.

Menurut *Sigmund Neumann* partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan (ideologi) yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik

¹⁰ Ellya, Rosana. 2012. “Partai Politik Dan Pembangunan Politik”, Jurnal TAPIs, Vol.8, No.1.

dan merebut kedudukan politik biasanya secara konstitusional (pemilu) untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian partai politik di atas, partai politik pada hakekatnya mempunyai kemampuan penetrasi (penguasaan jabatan publik) tidak hanya dalam konteks orientasi jabatan publik atau yang kemudian disebut *office*, melainkan juga dalam orientasi *to drive public policy*. Untuk itu, secara umum fungsi partai politik adalah representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen, pemilihan pemimpin, pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah.¹²

Institusionalisasi partai politik adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan value (nilai) dan stability (stabilitas) tertentu. Ketika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik.¹³

Menurut Huntington, institusionalisasi partai politik adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan value (nilai)

¹¹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm.16

¹² Macridis, Roy C. 1996. "Pengantar, Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai", dalam Dr. Ichlasul Amal. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. Hal. 6.

¹³ Primadi, Agam., Purwaningsi, Titin. 2019. "Institusionalisasi Partai Politik dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus: Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)", *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 3, No. 1, Hal. 63-78.

dan stability (stabilitas) tertentu.¹⁴ Ketidakmampuan partai politik untuk mengimplementasikan segala peran dan fungsinya dalam realitas politik menjadi hal yang memperpanjang catatan buruk bagi partai politik itu sendiri. Intitusionalisasi partai tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena terdapat kelemahan-kelemahan internal dan eksternal partai. Kemampuan eksternal dari partai politik yang belum berjalan fungsional secara baik, ditambah konflik internal organisasi yang semakin mengemuka sehingga menenggelamkan peran partai politik secara institusi.

Partai politik yang berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik. Salah satu masalah serius yang dihadapi partai-partai di Indonesia saat ini adalah tidak adanya institusionalisasi dalam tubuh partai secara menyeluruh. Partai seakan-akan hanya menjalankan aktivitasnya menjelang pemilu. Setelah itu, masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan partai.¹⁵

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga kelemahan utama partai politik di Indonesia. Pertama, ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik, yang diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan

¹⁴ Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian ilmu Politik*, Bandung : Alfabeta 2012

¹⁵ Gustiana Kambo, *Dimensi Proses Pelembagaan Partai Politik (Studi tentang Kelembagaan Partai Golkar di Provinsi Sulawesi Selatan)*, Makassar: *Journal of Society and Governance*, 2017

partai yang satu dengan partai yang lain. Kedua, secara internal, organisasi partai kurang dikelola secara demokratis, sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai dari pada organisme yang hidup sebagai organisasi anggota. Ketiga, secara eksternal kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas terhadap publik.¹⁶

Institusionalisasi partai politik menurut Guetermo O'Donnell, melibatkan dua aspek penting, yaitu value infusion (nilai pemasukan) dan behavioral routinization (rutinitas perilaku).¹⁷ *Pertama*, value infusion merupakan suatu proses dimana para anggota menggeser fokus dari tujuan-tujuan dan kepentingan individual yang spesifik ke arah tujuan-tujuan besar organisasi partai politik. Dari sini maka partai politik akan dapat mengembangkan legitimasi, penerimaan di masyarakat, dan tentunya mengakarnya partai politik (party rootedness).

Kedua, behavioral routinization, hal ini terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang stabil, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan informal tertanam di dalam pola-pola aktivitas partai sehingga akan ada prediktabilitas dan reguritas perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari para anggota, pengurus partai politik, maupun masyarakat luas lainnya. Hal ini tentu tidak akan berlangsung mudah, karena selalu saja ada upaya-upaya pembajakan partai politik oleh segelintir elit maupun oligarki partai untuk kepentingan politik sempit mereka. Terkadang juga partai politik tidak mampu mengelola rutinitas perilaku ini karena

¹⁶ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, hal. 232

¹⁷ Efriza, Political Explore: Sebuah Kajian ilmu Politik, Bandung : Alfabeta 2012

terciptanya disfungsi faksionalisme (*dysfunctional factionalism*) yang membuat partai politik sulit untuk menjadi aktor politik yang solid dan tunggal akibat pertarungan faksi-faksi yang tajam.

Institusionalisasi partai politik menurut *Vicky Randall dan Lars Svasan* adalah:

“...Proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (*the process by which the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture*)”.

Proses institusionalisasi ini mengandung dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini dipersilangkan maka akan melibatkan setidaknya 4 dimensi penting,¹⁸ sebagai berikut:

a. Dimensi Kesisteman Partai Politik (Systemnes)

Dimensi kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanismenya yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu.

¹⁸ Vicky Randall dan Lars Svasand (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London, hal 5-29

Dimensi kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin partai yang disegani ataukah pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART).

b. Dimensi Identitas Partai Politik (Value Infusion)

Dimensi Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai, basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (popular bases), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan

tangible, resources berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai).

Partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai bila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai itu. Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas. Selain itu karena ideologi partai belum dijabarkan dalam bentuk pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan, maka perbedaan di antara partai politik itu baru tampak secara simbolis. Karena itu, masih sukar mengategorikan basis sosial pendukung setiap partai politik di Indonesia.

c. Dimensi Otonomi Partai Politik (Decisional Autonomy)

Dimensi otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa: (a) hubungan ketergantungan kepada aktor luar, (b) hubungan bersifat saling tergantung

(interdependen), dan (c) hubungan itu berupa jaringan (linkage) yang memberi dukungan kepada partai.

Partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi otonomi partai bila keputusan partai politik itu tidak didikte pihak luar tetapi diputuskan sendiri dengan atau tanpa konsultasi dengan aktor luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung partai itu. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran.

d. Dimensi Pengetahuan Publik Terhadap Partai Politik (Reification)

Dimensi pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik tersebut. Adapun hal yang menjadi isu utama di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai tersebut, maka pihak lain baik individu maupun lembaga di masyarakat akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut.

Partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik tersebut sesuai identitas nilai (platform) partai itu

sehingga masyarakat pun dapat memahami (meski belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain. Harus dibedakan secara jelas antara mengetahui sosok dan kiprah suatu partai sesuai yang dimaksudkan partai itu dengan sikap setuju atau tidak setuju terhadap sosok dan kiprah partai tersebut.

Dimensi pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai. Makin tua umur suatu partai politik makin jelas definisi atau pengetahuan publik mengenai partai. Makin luas dan mendalam kiprah suatu partai dalam percaturan politik, makin mudah bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui sosok dan kiprah partai politik tersebut.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini sebagai upaya untuk mencari perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil dari temuan yang peneliti temukan terkait dengan judul penelitian yang diangkat:

Penelitian Pertama, yang dilakukan oleh Debora Sanur Lindawati yang berjudul “Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan aturan main dalam pemilu 2014 dan bagaimana strategi parpol dalam menghadapi pemilu 2014. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teori dan konsep yang digunakan adalah teori sistem pemilu, teori

perwakilan, teori elite sebagai wakil rakyat, teori partai politik, dan konsep strategi kampanye politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketing politik tidak dapat hanya dilihat selama periode kampanye saja.

Partai politik harus terus menerus memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana Partai dan para caleg dan capresnya terus melakukan kampanye politik yang bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus, karena tujuan dari marketing politik secara umum adalah untuk menjadikan pemilih sebagai subyek dan bukan sebagai obyek politik. Dalam strategi pemenangan pemilunya, partai perlu mengorganisir kegiatan kampanye secara kolektif. Oleh karenanya di tengah apatisme masyarakat terhadap partai, para politisi dan partai harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masih ada politikus yang bertanggungjawab kepada konstituennya.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Muhammad Lutfi yang berjudul "Pelebagaan Partai Politik Di Tingkat Lokal (Studi tentang pelembagaan partai Golkar di kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009 dan untuk mengungkap kendala-kendala yang dihadapi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai dalam proses pelembagaan partainya. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep partai politik dan teori pelembagaan partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahannya pada Pemilu 2009 belum berhasil membangun kelembagaan partai yang kuat, dengan beberapa alasan. Pertama, Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam hal-hal tertentu terkait dalam pengambilan keputusan masih dipengaruhi oleh kuatnya unsur ketokohan dan elitisme, baik yang berasal dari internal Partai Golkar Kabupaten Sinjai sendiri maupun dari level-level di atasnya (DPD I dan DPP). Kedua, pengurus partai di daerah jarang sekali melakukan inovasi dan kreatifitas program yang dapat mendukung arah dan perjuangan sesuai dengan visi dan misi partai. Program-program yang dilaksanakan senantiasa dilakukan sekedar melaksanakan amanah partai, tanpa ada tindak lanjut nyata sebagai wujud keberlanjutan program. Ketiga, lemahnya pemahaman kader partai akan ideologi dan platform partai sebagai basis identitas partai. Keempat, Partai Golkar Kabupaten Sinjai secara kelembagaan sampai saat ini tidak memiliki basis yang kuat di masyarakat.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Ilham Prawansyah yang berjudul “Institusionalisasi Partai Politik (Studi Tentang Konsolidasi Internal DPD II Golkar Makassar Menjelang Pilwalkot 2013)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat institusionalisasi dalam melakukan konsolidasi internal di tubuh DPD II Golkar Makassar menjelang Pilwalkot 2013, Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah partai politik, institusionalisasi partai politik, dan hukum besi oligarkis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perlawanan dari beberapa kader muda terhadap keputusan DPP Partai Golkar dalam rekomendasi dukungan dikarenakan penetapan pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid pada Pilwalkot Makassar tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar. DPP mengindahkan hasil dari konsolidasi yang telah lama dibangun kader di tingkat pengurus lokal untuk mengutamakan calon yang dapat diterima di masyarakat Makassar dan juga di internal Golkar Makassar. Dinamika yang terjadi juga sangat mempengaruhi solidaritas kader Golkar terhadap usungan Partai Golkar yaitu pasangan SuKa. Seperti kurangnya dukungan langsung dari DPD I Golkar Sulawesi Selatan terhadap kemenangan SuKa di Pilwalkot Makassar mengindikasikan terjadinya perpecahan di internal partai. Selain itu, majunya Irman Yasin Limpo (None) menjadikan beberapa kader memilih untuk solid ke None ketimbang mensosialisasikan usungan partai Golkar walaupun DPD II Golkar Makassar secara tegas menindak kader yang telah melawan keputusan partai dengan sanksi pemecatan.

Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Andi Rahmat Hidayat yang berjudul "Institusionalisasi Partai Politik (Studi Tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan Pada Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang Tahun 2013)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika organisasi DPW PAN Sulawesi Selatan pasca rekomendasi dukungan pada pasangan Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang pada pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2013 dan bagaimana

proses institusionalisasi yang terjadi dalam tubuh DPW PAN Sulawesi Selatan pasca rekomendasi dukungan kepada pasangan Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu'Mang pada pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2013. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah partai politik dan institusionalisasi partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan beberapa indikasi yang telah melemahkan kedaulatan institusi partai secara kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi berupa perbedaan pendapat dalam menyikapi rekomendasi dukungan yang dikeluarkan oleh DPP PAN. Beberapa elit dan entitas partai di tingkat grassroot memperlihatkan sikap yang bertolakbelakang dengan keputusan tersebut, yang notabeneanya mengikat bagi seluruh elemen dalam partai. Sehingga hal ini berimplikasi pada kedaulatan institusi partai secara menyeluruh dimana beberapa kader membelokkan dukungan ke pasangan Ilham–Aziz (IA). Namun secara umum, DPW PAN SULSEL tetap menunjukkan bahwa dinamika yang berlangsung di internal partai mampu disikapi secara baik dalam menunjang penguatan institusionalisasi partai, diantaranya dengan melakukan upaya penguatan aturan organisasi partai sebagai bentuk kedaulatan partai secara menyeluruh. hal ini terbukti ketika DPW PAN sebagai partai koalisi mampu memaksimalkan peranannya dalam memenangkan Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang di PILGUB SULSEL tahun 2013.

Penelitian kelima, yang dilakukan oleh Hijriyah Y yang berjudul “Institusionalisasi Partai Nasdem Di Kabupaten Gowa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Partai Nasdem dalam memperluas jaringan politiknya di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui kendala apa yang dialami partai Nasdem dalam memperluas jaringan politiknya di Kabupaten Gowa. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah partai politik dan institusionalisasi partai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perluasan struktur politik sebagai salah satu alasan digalinya upaya-upaya perluasan jaringan politik yang merupakan langkah awal bagi Partai NasDem Gowa, terdapat beberapa upaya yang lainnya antara lain *sistem o250* (yang merupakan sistem informasi dan perekrutan taraf online yang sangat membantu pergerakan Partai NasDem Gowa yang isi dan fungsinya akan dipaparkan pada isi pembahasan), upaya melalui kinerja caleg Partai NasDem Kabupaten Gowa, penguatan dan perluasan struktur pengurus, kinerja dari sayap-sayap Partai NasDem Kabupaten Gowa, integrasi semua elemen dengan tujuan yang memperkuat kedudukan NasDem, Media massa yang menunjang keberadaan Partai NasDem Gowa, sosialisasi Partai NasDem Gowa. Adapun kendala yang dihadapi Partai NasDem Gowa dalam upaya tersebut antara lain kendala internal seperti dampak cara baru berpartai Partai NasDem Gowa dan program khusus masyarakat, adapun kendala eksternal seperti masyarakat pragmatis dan partai kompetitor dan oknum masyarakat yang kontra. Upaya dan kendala

yang ada di Partai NasDem Gowa ini menunjukkan telah adanya langkah dari Partai NasDem Gowa dalam menginstitutionalisasi partainya.

Penelitian keenam, yang dilakukan oleh Muh. Sulfi Hidayatullah yang berjudul “Institutionalisasi Partai Perindo Di Makassar (Peran Elite Dalam Pengembangan Jaringan Politik Partai)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran elite dalam pengembangan jaringan politik Partai Perindo di Makassar. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori elite, partai politik, hukum besi oligarki, dan institutionalisasi partai politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan jaringan politik partai Perindo di kota Makassar didukung dari peran figure dan kemampuan finansial elit yang mampu mendongkrak penerimaan partai di masyarakat dan pemanfaatan media yang begitu massif sehingga partai dengan mudah memperkenalkan organisasi dan elit politiknya, lewat media pula pesan-pesan politik mampu disampaikan melalui iklan dan tayangan yang telah diatur sedemikian rupa untuk maksud serta pesan tertentu. Orang-orang diluar organisasi (partai) juga terlibat aktif dalam proses politik atau disebut sebagai simpatisan walaupun tidak berperan aktif secara struktural organisasi namun dukungan dan support simpatisan begitu berarti dalam mengembangkan jaringan politik partai. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka penulis melihat adanya kesamaan tema dan lokasi penelitian yang akan dilakukan sehingga menjadi alasan untuk dijadikan bahan rujukan untuk melakukan

analisis pada temuan penelitian ini. Adapun perbedaan yang ditemukan antara penelitian yang akan dilihat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya lebih fokus pada strategi partai dalam memenangkan pemilu, seperti peran elite partai dan bagaimana partai politik memperluas jaringan politiknya. Selain itu penelitian sebelumnya juga fokus pada evaluasi hasil pemilu bukan pada tahap persiapan menghadapi pemilu. Penelitian ini mengkaji tentang persiapan Partai Golkar dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024. Pada penelitian ini akan melihat seperti apa persiapan Partai Golkar dalam menghadapi pemilihan legislatif 2024 dari segi institusionalisasi partainya.

2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam melihat fenomena politik di Indonesia khususnya pada pemilihan legislatif tahun 2024 yang akan datang, peneliti menggunakan pendekatan dan teori untuk menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian yang diajukan. Sesuai dengan pendekatan dan teori yang dijabarkan diatas, sekiranya dapat menjelaskan banyak hal tentang analisa institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi kesisteman dan pengetahuan publik dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024.

Dalam kaitan dengan persiapan menghadapi Pemilu 2024, Partai Golkar memperkuat kaderisasi. Terkait dengan standar rekrutmen anggota dan pengurus di internal Partai Golkar, secara prosedural telah

diatur dalam AD/ART partai. Selain sistem rekrutmen dan kaderisasi, Partai Golkar sebagai sebuah partai yang telah lama berkiprah, memiliki organisasi-organisasi internal yang cukup banyak sebagai bagian integral partai. Dalam tubuh Partai Golkar dikenal adanya organisasi-organisasi baik yang dibentuk oleh partai maupun organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada Partai Golkar. Partai Golkar menggunakan kader dan keseluruhan anggota organisasi pendiri atau Hasta Karya dan organisasi yang didirikan untuk membantu pemenangan Pemilu tahun 2024 mendatang melalui pembentukan kelembagaan partai secara struktural.

Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam pelaksanaannya menerapkan demokrasi di internal partai untuk senantiasa berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada dalam AD/ART Partai . Hal itu dilakukan untuk memberikan peluang kepada seluruh anggota dan pengurus untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan hanya dalam penerapan aturan-aturan dalam partai, tetapi juga berlaku dalam semua proses pengambilan kebijakan.

Partai Golkar Sulawesi Selatan sendiri lebih mengedepankan proses musyawarah dalam membuat aturan maupun dalam perumusan kebijakan tertentu. Menurut prosedur yang ada, bahwa beberapa kebijakan dapat ditentukan sendiri oleh pengurus DPD I, juga ada yang harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari level yang lebih tinggi dalam hal ini DPP. Jika kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan tidak terlalu urgen dan strategis, Partai Golkar Sulawesi Selatan biasanya

melakukan rapat pengurus, misalnya dalam menentukan panitia-panitia kegiatan partai. Untuk menjaga terjaminnya proses demokrasi dalam partai, senantiasa diupayakan melaksanakan rapat konsolidasi tiap bulan di Kantor DPD I.

Hasil penelitian dengan beberapa wawancara yang telah dilakukan, bahwa dari segi keutuhan organisasi Partai Golkar Sulawesi Selatan relatif aman. Meskipun kadang muncul faksi-faksi di dalam partai, namun munculnya faksi tersebut tidak sampai mengganggu keutuhan organisasi. Mekanisme yang dilakukan untuk menghindari terjadinya faksi atau perpecahan dalam tubuh partai ke depan, Partai Golkar Sulawesi Selatan berupaya untuk meredam dengan melakukan konsolidasi internal partai.

Partai Golkar melalui rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang dilaksanakan di Makassar menekankan pentingnya pelembagaan atau institusionalisasi partai dalam dimensi kesisteman hal itu disampaikan langsung oleh ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam sambutannya bahwa langkah persiapan yang utama dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang adalah konsolidasi internal Partai Golkar untuk memperkuat pelembagaan atau institusionalisasi partai. Hal ini sejalan dengan perkataan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid yang mendorong adanya konsolidasi secara menyeluruh di tubuh DPD I Partai Golkar Sulsel, terlebih pemilu 2024 sudah di depan mata, dimana partai politik lain sudah bergerak dan bermanuver untuk merebut posisi Partai Golkar melihat ketatnya peta persaingan politik di Sulawesi Selatan.

Partai Golkar Sulawesi Selatan dibawah komando Taufan Pawe telah menyelesaikan konsolidasi 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, sejauh ini 24 Kabupaten/Kota sudah menggelar musyawarah daerah memilih ketua baru definitif, 7 diantaranya dipimpin oleh kepala daerah kader Golkar. Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe menargetkan Partai Golkar kembali menjadi pemenang pemilu di Sulawesi Selatan. Partai Golkar Sulawesi Selatan juga memperkuat kaderisasi dan menggunakan seluruh kader dan pengurus partai untuk membantu pemenangan pada pemilihan legislatif tahun 2024 yang akan datang melalui pembentukan kelembagaan partai secara struktural.

Dalam dimensi pengetahuan publik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengintruksikan seluruh kader Golkar untuk terus bergerak dan turun langsung dalam penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional agar lebih dekat dengan masyarakat.

Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan merespon intruksi dari ketua umum dengan meluncurkan *Yellow Clinic* yang diresmikan bersamaan dengan pelantikan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe di acara ulang tahun Golkar yang ke-57, Taufan Pawe mengatakan *Yellow Clinic* ini bukan sekedar klinik biasa, klinik ini bersifat pratama yang artinya mulai dokter dan perawatnya

itu jelas dan bisa bekerja sama dengan BPJS, sehingga klinik ini memang serius melayani masyarakat. Selain *Yellow Clinic* DPD I Partai Golkar Sulsel telah menggelar sejumlah kegiatan kemanusiaan seperti bantuan UMKM, bantuan bencana alam, bantuan Pendidikan dan Kesehatan, serta vaksinasi.

Dimensi Institusionalisasi partai yang dikemukakan oleh *Randall dan Svasand* inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam penelitian ini, dimana terdapat empat dimensi, namun karena keterbatasan penulis dalam menggali informasi terkait empat dimensi dan melihat kecenderungan DPD I Partai Golkar Sulsel dalam menghadapi pemilihan legislatif lebih kepada dua dimensi yaitu pertama dimensi kesisteman yang berkaitan dengan proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik, kesisteman DPD I Partai Golkar Sulsel akan dilihat dari bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi partai guna mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024.

Kedua dimensi pengetahuan publik, merujuk pertanyaan bagaimana DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mencitrakan dirinya menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024? Sehingga dimensi institusionalisasi *Randall dan Svasand* nantinya akan digunakan dalam menganalisis bagaimana institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulsel

pada dimensi kesisteman, dan pengetahuan publik dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang?

2.5. Skema Kerangka Pikir

Skema kerangka pikir yaitu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel. Penelitian dengan adanya dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan berbentuk komparasi maupun hubungan. Kerangka pikir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

